

BAB I

PENDAHULUAN

Iran sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah telah hadir di tengah persaingan pasar minyak antara Rusia dan Tiongkok hingga memengaruhi dan menyingkirkan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Diplomasi di berbagai pemerintahan secara alami dalam rangka memajukan prinsip-prinsip politik luar negeri yang telah digariskan dalam undang-undang dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar Iran disebutkan sejumlah prinsip seperti perjuangan hak bangsa-bangsa tertindas sebagai landasan politik luar negeri Iran. Prinsip tersebut adalah permanen dan tidak dapat diubah.

Politik luar negeri Iran sama seperti sebagian besar negara dunia yang berdasarkan kepentingan jangka panjang dan berbagai nilai yang tidak akan berubah dengan selera dan aliran politik pemerintah yang silih berganti. Politik luar negeri Iran pada hakikatnya mengacu pada tujuan-tujuan Revolusi Islam dan para pejabat kementerian luar negeri serta para duta besar dan kuasa usaha negara ini juga harus memperhatikan tujuan dan prinsip tersebut.

Revolusi Iran merupakan revolusi yang mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula "*revolusi besar ketiga dalam sejarah,*" setelah Perancis dan Revolusi Bolshevik.

Pada 23 Januari, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat bahwa Tiongkok akan membangun dua pembangkit energi tenaga nuklir di Iran selatan dan Iran akan memasok minyak dalam jangka panjang untuk Tiongkok. Kesepakatan berjangka sepuluh tahun tersebut akan meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara menjadi 600 miliar dolar AS, demikian dilaporkan Tehran Times.

Uraian konsep diatas memunculkan isu strategi politik luar negeri Republik Revolusi Islam Iran terhadap Republik Rakyat Tiongkok dalam Isu Energi Tahun 2005-2013.

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 1979 rezim monarkhi Iran dibawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi¹ digulingkan oleh revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 digunakan nama resmi Republik Revolusi Islam Iran.² Republik Revolusi Islam Iran merupakan salah

¹ Mohammad Reza Pahlavi lahir di Tehran, Iran pada tanggal 26 Oktober 1919 dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 27 Juli 1980 pada umur 60 tahun, yang menyebut dirinya Yang Mulia Baginda, dan memegang gelar kerajaan Shahanshah (Raja segala raja), dan Aryamehr (Cahaya bangsa Arya) dan Bozorg Arteshtārān (Kepala Pejuang) adalah raja Iran dari 16 September 1941 hingga digulingkan dalam Revolusi Iran pada 11 Februari 1979. Ia adalah raja kedua dari Dinasti Pahlavi and Shah terakhir dari monarki Iran. Pada pertengahan 1970-an, bergantung pada pendapatan minyak yang besar, Mohammad Reza Pahlavi memulai merencanakan proyek-proyek besar dalam rangka pembangunan nasional Iran, menindaklanjuti program Revolusi Putih. Namun kemajuan sosial-ekonomi tersebut justru menimbulkan ketidakpuasan kalangan ulama. Para pemimpin Islam Syiah, khususnya Ayatollah Ruhollah Khomeini, melampiasikan ketidakpuasan ini dengan menyerukan penggulingan Mohammad Reza Pahlavi dan kembali kepada tradisi Islam, yang disebut Revolusi Islam Iran. Dinasti Pahlavi runtuh menyusul pemberontakan yang meluas pada tahun 1978 dan 1979. Lihat M. Mo'in. *An Intermediate Persian Dictionary*. Six Volumes. Amir Kabir Publications, 1992.

² Sidik Jatmika. *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*, Maharasa, Yogyakarta. hlm. 100.

satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah yang memiliki posisi strategis dalam melakukan interaksi internasional saat ini. Iran merupakan negara dengan perubahan interaksi internasional yang sangat dinamis terlihat dari perbedaan mencolok antara Iran pra dan pasca revolusi adalah kebijakan luar negeri dan diplomasinya terhadap negara-negara *super power* seperti Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Iran terutama mengenai cadangan minyak dan gas yang dimiliki oleh Iran disamping juga kebijakan Iran terhadap dunia Islam. Dan secara politik kemajuan pasca revolusi Iran membuat posisi Iran semakin kuat.

Kemajuan Iran telah sampai pada pengembangan teknologi nuklir. Keterlibatan Iran dalam penelitian dan pengembangan nuklir dimulai pada pertengahan tahun 1960 pada masa pemerintahan Shah atas dukungan Amerika Serikat dalam kerangka kerja perjanjian bilateral antar dua negara tersebut. Amerika Serikat dan Iran menandatangani *Nuclear Cooperation Agreement* pada tahun 1957 yang mulai berlaku pada 1959.³ Fasilitas nuklir yang pertama kali dibangun adalah *Tehran Nuclear Research Center* (TNCR) di tahun 1967 yang bertempat di *Tehran University* dan dijalankan oleh *Atomic Energi Organization of Iran* (AEOI). Iran menandatangani traktat non-proliferasi pada tanggal 1 Juli 1968 (NPT). Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Majelis. Pada artikel IV traktat tersebut disebutkan bahwa Iran memiliki hak untuk mengembangkan penelitian, memproduksi dan menggunakan

³ Kiki Mikail "Iran Di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)". Jurnal, <http://eprints.radenfatah.ac.id/36/1/Karya%20Ilmiah%20Kiki.pdf> diakses tanggal 07 Maret 2016.

nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi, dan memperoleh peralatan, material, dan informasi serta teknologi.⁴

Kontroversi mengenai program nuklir Iran kembali mencuat sejak Agustus 2002 ketika *National Council of Resistance in Iran* (NCRI) mengungkapkan informasi bahwa Iran telah membangun fasilitas yang berhubungan dengan nuklir di Natanz dan Arak. Di tahun tersebut juga, *International Atomic Energy Agency* (IAEA) mulai melakukan investigasi. Hasil dari investigasi ini, yang juga didukung informasi yang diberikan Teheran sendiri, mengungkapkan bahwa Iran telah terlibat dalam berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan nuklir secara terselubung, yang beberapa diantaranya telah melanggar perjanjian. Termasuk diantaranya adalah eksperimen mengenai pemisahan plutonium, pengayaan uranium dan mengimpor komponen-komponen uranium.⁵

Iran mulai melanjutkan konversi uranium pada Agustus 2005 di bawah kepemimpinan Ahmadinejad, yang telah terpilih dua bulan sebelumnya. Iran mengumumkan pada Januari 2006 bahwa Iran akan melanjutkan penelitian dan pengembangan nuklir di Natanz.⁶ Sebagai respon terhadap isu ini, IAEA mengadopsi resolusi 4 Februari 2006 yang mencantumkan mengenai Dewan Keamanan. Proyek nuklir yang dikembangkan di Iran bersifat damai dan dimaksudkan untuk mempermudah Iran dalam mencapai kepentingan nasionalnya

⁴ *Ibid.*

⁵ Andi Farkan, <https://middleeastindonesia.wordpress.com/2011/07/10/analisis-kebijakan-proliferasi-nuklir-iran-masa-kepemimpinan-ahmadinejad/> diakses pada tanggal 07 Maret

2016.

⁶ Menik Lestari, "Mahmoud Ahmadinejad (Studi Pemikiran Dan Dampak Pemikiran

Politik Tahun 2005-2012)”. <https://eprints.uns.ac.id/11168/1/1526-3474-1-PB.pdf>, hlm. 11-12.

ditengah persaingannya dengan negara-negara dunia lainnya. Proyek nuklir Iran salah satunya dimaksudkan untuk menciptakan suatu ketahanan energi di negara tersebut. Ketahanan energi yang dimaksud adalah kemampuan Iran untuk menyediakan suatu alternatif energi selain minyak bumi dan gas alam dan juga untuk memberikan jaminan atas suplai energi terkait meningkatnya konsumsi energi listrik. Peningkatan konsumsi energi didorong oleh pertumbuhan penduduk yang cukup cepat dan juga guna mendorong sektor industri di Iran.⁷

Iran memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar. Hal ini membuat Iran menempati posisi sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan juga posisi terbesar kedua setelah Russia menyangkut cadangan gas alamnya. Walaupun begitu, perlu disadari bahwa minyak bumi dan gas alam sifatnya tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis sehingga membuat Iran tidak dapat sepenuhnya menyandarkan kebutuhan energinya pada kedua sumber daya alam tersebut. Beberapa kondisi tersebut menuntut perlunya pengembangan teknologi nuklir sehingga mampu memasok kebutuhan energi listrik dan melakukan antisipasi kebutuhan energi dimasa mendatang. Maka, pasokan energi yang baik dan lancar dapat menjaga jarak persaingan dengan negara lain.

Program nuklir mampu memberikan suplai energi listrik baru yang lebih terjamin dan lebih murah daripada dengan cara konvensional. Proyek nuklir Iran memberikan suatu keuntungan ekonomis dengan biaya yang murah daripada cara produksi energi konvensional. Keberhasilan pemerintah Ahmadinejad di bidang

⁷ *Ibid.*

politik luar negeri harus dilihat ke belakang, ketika Ahmadinejad baru saja terpilih sebagai presiden ke sembilan RII. Pada masa-masa itu, terjadi krisis yang serius dalam hubungan luar negeri Iran dengan Barat.

Dalam perkembangan politik luar negeri, Iran perlu menjalankan politik luar negerinya dengan membangun koneksi dan jalur strategis dengan negara tetangganya yaitu Rusia dan Tiongkok.⁸ Mulai dari pemerintahan Ali Khomeini sampai Khatami, hubungan Iran dengan Tiongkok belum ada peningkatan kerjasama di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Selama bertahun-tahun Tiongkok terus memberikan dukungannya kepada Iran. Iran sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan Tiongkok, sehingga dapat dikatakan bahwa pilar utama hubungan kedua negara tersebut adalah di bidang ekonomi, sehingga Iran terus melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yang mana memberikan Tiongkok kesempatan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Dimana Tiongkok merupakan negara dengan industri maju yang merupakan menjadi mitra strategis untuk menjalin kerjasama terutama dalam menghadapi politik luar negeri Amerika Serikat yang sewaktu-waktu dapat mengancam keamanan Iran. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul strategi politik luar negeri Republik Islam Iran terhadap Republik Rakyat Tiongkok dalam bidang energi tahun (2005-2013).

⁸<http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/106624-prinsip-strategis-politik-luar-negeri-republik-islam-iran>

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan rumusan masalah yakni mengapa Republik Revolusi Islam Iran meningkatkan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam bidang energi pada tahun 2005-2013?

C. TUJUAN PENELITIAN

Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai strategi politik luar negeri Iran terhadap Tiongkok dalam bidang energi pada masa pemerintahan Ahamaddinejad.
2. Mengetahui lebih lanjut tentang program nuklir Iran yang dijalankan oleh pemerintahan Ahamaddinejad
3. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan penulis di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Guna mendukung penelitian ini diperlukan teori politik yang sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pengertian Kebijakan luar negeri (foreign policy) adalah merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara

lain atau unit politik internasional lainnya dikendalikan dalam kepentingan nasional.⁹ Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Oleh karenanya untuk menganalisis bagaimanakah pertautan antara kedua faktor politik ini, dapat digunakan teori linkage yang dikemukakan James N. Rosenau (1980). Di samping faktor politik domestik dan eksternal internasional tersebut, menurut Rosenau, terdapat pula variabel individu decision-maker seperti Kepala Negara Pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya.

Variabel individu ini biasanya terlihat pada gaya kepemimpinan yang khas dari decision-maker tersebut yang umumnya sangat bersifat personal.

Menurut James N. Rosenau, terdapat lima sumber yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, diantaranya adalah :

1. Idiosinkretik, berhubungan dengan karakteristik individu dari pembuat keputusan.
2. Governmental, faktor pemerintahan.
3. Societal, faktor masyarakat.
4. Peran , dari pembuat keputusan tersebut.
5. Sistemik

⁹ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-luar-negeri-faktor.html>

Menganalisis politik luar negeri merupakan suatu usaha untuk menyelidiki suatu fenomena kompleks dan luas yang kurang lebih melibatkan kehidupan internal (aspirasi, atribut, budaya, konflik, kapabilitas, institusi dan rutinitas) dan eksternal dari sekelompok masyarakat yang berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh dan menjaga identitas sosial, hukum dan geografis, sebagai sebuah bangsa.¹⁰

Sedangkan William D. Coplin secara mendalam membahas berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik luar negeri (*theory of decision making process foreign policy*) suatu negara. Menurutnya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu (1) Kondisi politik dalam negeri; (2) kemampuan ekonomi dan militer; dan (3) konteks internasional.

Teori ini sesungguhnya dipakai untuk memahami sejarah yang ditulis oleh Thucydides dalam bukunya "*Peloponnesian War*":

"...examined the factors that led the leaders of city-states to decide the issues of war and peace, as well as alliances and empire, with as great precision as they did under the circumstance confronting them...He focused on the conscious reasons choices and their perceptions of systemic environment...also the deeper psychological forces of fear, honor and interest that in varying combinations motivated them..."

(menerangkan berbagai faktor yang membimbing para pemimpin berbagai negara kota dalam memutuskan perang dan damai, persekutuan dan super power. Fokus pada berbagai alasan yang secara sadar dipilih, pandangan terhadap situasi lingkungan sekitar... termasuk berbagai dorongan psikologis seperti ketakutan, kehormatan, kepentingan, dan berbagai faktor yang mendorong mereka mengambil suatu keputusan).

¹⁰ <http://unique-21.blogspot.co.id/2011/12/proses-kebijakan-luar-negeri-menurut.html>

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri.

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan "*policy influencer*". Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para

pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dan lain-lain. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

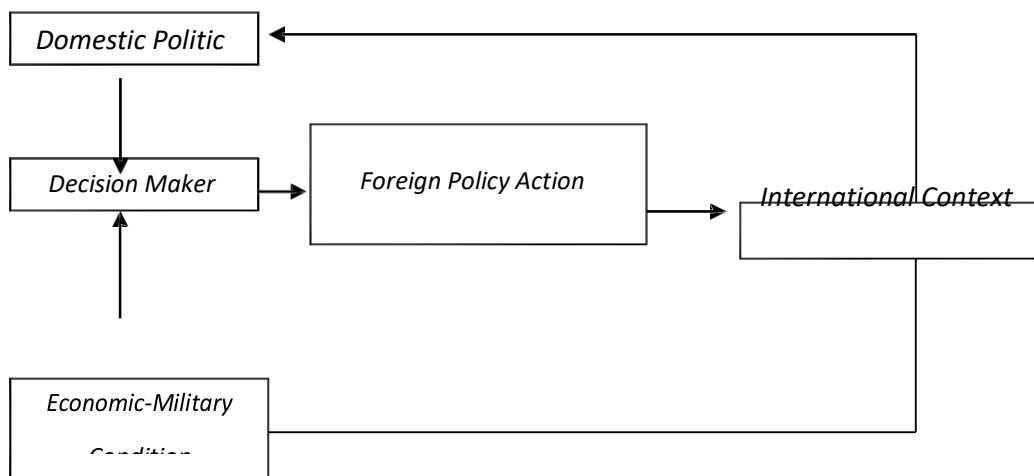
Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi lebih kuat.

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan merujuk pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana akan efektif. Misalnya Amerika Serikat, paska Perang Dingin negara ini semakin agresif menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kepentingan nasionalnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk merubah sistem politik

internasional.

Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.¹¹

Gambar I.1 Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D.Coplin
Politik Luar Negeri



Sumber : William D.Coplin, *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 30

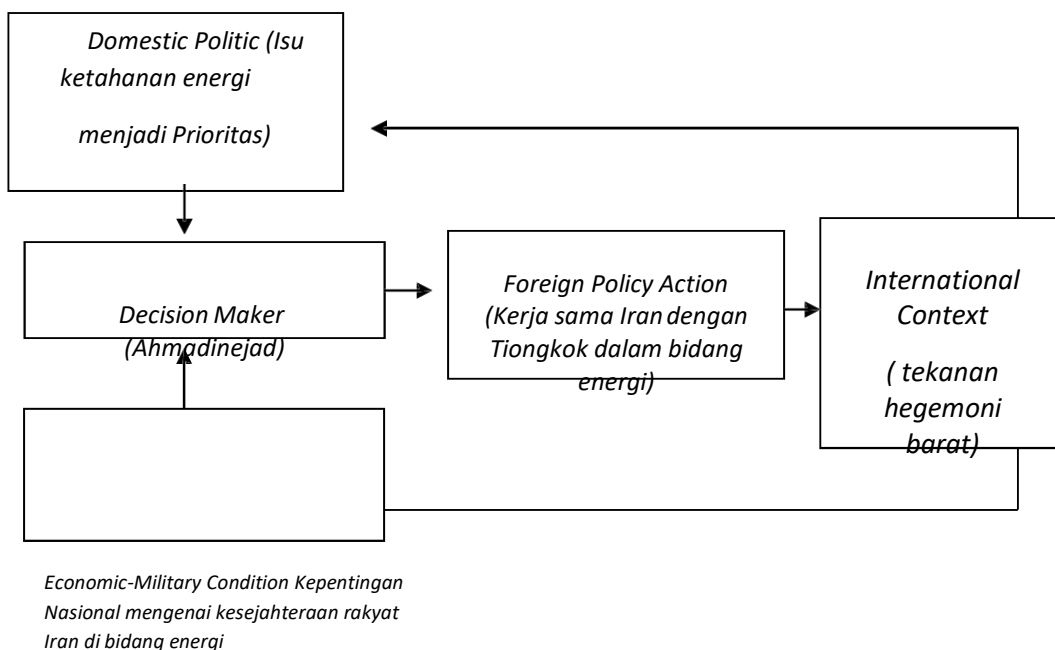
¹¹ Fahmi Z. Fathani. *Revitalisasi Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Timur Tengah Pasca Insiden Mavi Marmara 2010*, Yogyakarta. Hlm.13-20.

Menurut gambar di atas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional akan tetapi pengambil keputusan luar negeri di mana dalam konteks ini presiden sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, di mana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.

Sebelum penjelasan yang lebih jauh, Penulis akan gambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut sebagai berikut:

Gambar II.2 Aplikasi gambar teori pengambilan keputusan luar negeri

William D.Coplin Politik Luar Negeri



Faktor politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer dan konteks Internasional.

Kajian ini mencoba mencari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku politik luar negeri Iran terhadap Tiongkok. Dicari

kemungkinan berbagai variasi dari faktor yang pernah disampaikan William D. Coplin.¹² Misalnya berbagai dorongan psikologis seperti ketakutan, kehormatan, kepentingan, dan berbagai faktor yang mendorong mereka mengambil suatu keputusan.

Pada masa pemerintahan Ahmadinejad terjadi krisis yang serius dalam hubungan luar negeri Iran dengan Barat. Sehingga Ahmadinejad mengambil keputusan untuk menjalankan politik luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional mengenai kesejahteraan rakyat Iran dalam bidang energi yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan Tiongkok dalam bidang energi. Politik luar negeri yang dilakukan selain untuk mencapai kepentingan nasional Iran, juga untuk mengurangi tekanan hegemoni Barat yang sewaktu-waktu dapat mengancam Iran.

Robert G. Sutter melalui buku berjudul *Chinese Foreign Relations, Power and Policy Since The Cold War*¹³ secara khusus membahas aspek pola pengambilan keputusan luar negeri Iran melalui tulisan berjudul "*Changing patterns in Decision Making and International Outlook*". Kajian ini juga

menggunakan teori pengambilan keputusan atau *Decision Making Theories* untuk memahami keputusan Republik Rakyat Tiongkok yang tidak mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran.

¹² William D. Coplin, dalam James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr, 1990, *Contending Theories of International Relations*, Harper Collins Publisher, USA, hlm. 468-477

¹³ Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Relations, Power and Policy Since The Cold War*, Plymouth, UK: Rowman dan Littlefield Publishers, Inc, 2010, hlm. 1-17

E. HIPOTESA

Republik Revolusi Islam Iran meningkatkan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

- 1) Domestik Politik dibawah kepemimpinan Ahmadinejad dan Khomeini menghendaki Isu ketahanan energi menjadi prioritas utama bagi Iran.
- 2) Kontestasi internasional, dimana terdapat persamaan geopolitik Iran dan Tiongkok terhadap dominasi negara Barat di Timur Tengah

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai jangkauan dalam lingkup politik luar negeri Iran dalam interaksi global. Dimana peneliti akan berfokus pada kerjasama antara Iran dengan Tiongkok dalam bidang energi pada awal pemerintahan Ahmaddinejad pada tahun 2005 sampai akhir pemerintahan Ahmaddinejad tahun 2013. Studi yang dilakukan akan disajikan dan terkonsentrasi pada bidang energi terutama dalam proyek pengembangan nuklir Iran. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis akan keluar dari jangkauan apabila bahasan masih berhubungan erat dengan fokus penelitian.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan metode kualitatif sehingga penelitian ini akan berfokus pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang tersedia dari berbagai literature dan dari beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, otobiografi dan karya tulis lainnya.

Data yang diperoleh dari penelitian disampaikan apa adanya, lalu dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri atas:

Bab I terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang dinamika perkembangan kebijakan energi Republik Revolusi Islam Iran dari periode masing-masing kepemimpinan presiden revolusi Islam Iran yakni pada masa Ali Khomeini (1981-1989), kemudian pada masa Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997), dan pada masa Mohammad Khatami (1997-2005). Dimana dari ketiga masing-masing periode pemerintahan itu membahas masalah dinamika kondisi perekonomian, kemudian membahas kebijakan luar negeri masing-masing kepemimpinan. Dan diakhiri dengan membahas dinamika pertahanan dan militer.

Bab III terdiri atas peningkatan hubungan Luar Negeri Republik Revolusi Islam Iran dengan Republik Rakyat Tiongkok pada awal revolusi dan abad ke-21 sebelum dan setelah melakukan kerjasama dalam bidang nuklir, selanjutnya tentang bahasan mengenai kepentingan nasional Republik Revolusi Iran di bidang politik, keamanan, dan ekonomi.

Bab IV berupa analisis strategi Republik Revolusi Islam Iran terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Dimulai dengan melakukan strategi dibidang ekonomi dan militer, dimana Iran ingin mencapai kepentingan nasionalnya mengenai kesejahteraan rakyatnya di bidang ketahanan energi di Iran. Bahasan selanjutnya pelaksanaan strategi Iran juga dikuatkan pada faktor konteks internasional dimana Iran ingin keluar dari tekanan Barat sehingga mencari koalisi dengan kekuatan baru yakni Tiongkok.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian, penulis juga akan memberikan saran sebagai hasil penelitian pada akhir bab ini.